



Gejala Maksiat, Pendidikan Karakter dan Budaya Minangkabau

Received: 12th Maret 2020; Revised: 16th Mar 2020; Accepted: 23th Maret 2020

Fadhilah S. Psi. M. Pd.I.

Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol
Lubuk Lintah Padang
Email: fadhilahrustam1@gmail.com

Abstrak: Maraknya tindakan maksiat di Sumatera Barat belakangan ini telah mempengaruhi suasana kejiwaan anak-anak, pendidik dan orang tua di Minangkabau. Mereka akan melihat, bahwa ternyata praktik maksiat tidak jauh dari lingkungan sosial mereka. Mereka tidak hanya khawatir bahwa anak-anak mereka akan terpapar berita-berita negatif, tetapi juga bisa menjeremuskan generasi muda pada perilaku maksiat itu. Tulisan ini ingin membahas tentang tantangan orang tua dan pendidik di Sumatra Barat menghadapi maraknya fenomena maksiat di daerah ini. Padahal, Minangkabau adalah daerah berbudaya Islamis sesuai dengan filosofi “adat bersendi syarak syarak bersendi Kitabullah” (ABSSBK).

Abstract: Many cases of immoral in West Sumatera lately has influenced the psychiatric atmosphere of children, educators and parents in Minangkabau. They will see that the practice of immoral is not far from their social environment. They are not only concerned that their children will be exposed to negative news, but can also plunges young generation on the current behavior. This article wants to discuss the challenges of parents and educators in West Sumatra facing the rise of the current phenomenon of the area. In fact, Minangkabau is an Islamist region in accordance with the philosophy of "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah or “culture based on syara’, syara’ based on AlQuran (ABSSBK).

Keywords: ↯ Maksiat, Pendidikan Karakter, Budaya Minang

PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat Sumatera Barat yang umumnya memiliki latar belakang adat dan budaya Minangkabau sering dicengkeram berita-berita kurang sedap mengenai masalah prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS, narkoba, hingga angka perilaku seks menyimpang LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Berita-berita sumir tersebut muncul silih-berganti seolah-olah Ranah Minang atau Sumatera Barat sudah menjadi “sarang” maksiat.

Untuk fenomena prostitusi, setelah terungkap praktik prostitusi di daerah Lubuk Buaya, kota Padang akhir 2019 lalu, selanjutnya terbongkar pula kasus prostitusi *online* yang bermula dari aksi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota DPR-RI asal Sumbar Andre Rosiade terhadap seorang pekerja seks komersial (PSK) di sebuah hotel berbintang di kota Padang (*Singgalang*, 4 Februari 2020).

Mungkin saja masih banyak kurang percaya dengan isi pemberitaan media

massa yang kemudian disebarkan lagi secara lebih luas oleh media-media sosial itu. Pengungkapan kasus prostitusi daring (*online*) di Ibukota Provinsi Sumbar tersebut bahkan tidak hanya menjadi sekedar isu daerah, tetapi juga nasional, karena praktik maksiat semacam itu telah lama pula menjadi keresahan di kalangan perantau Minangkabau, seperti ditunjukkan mereka yang tergabung dalam organisasi Gebu Minang yang menganggap dan menilai perkembangan kondisi penyakit sosial di daerah leluhur mereka (Sumbar) tidak ubahnya seperti banyak daerah atau kota-kota besar lainnya di Indonesia (*Haluan*, 18 Juli 2018).

Mengenai masalah protitusi, walaupun terdapat kontroversi atas usaha penggerebekan kasus pelacuran yang dilakukan langsung oleh politisi muda Partai Gerindra tersebut, yang jelas bahwa praktik bisnis seks secara ilegal di kota Padang dan wilayah Sumbar pada umumnya memang makin mencemaskan sejak beberapa tahun ini. Bahkan modusnya kini lebih canggih, karena menggunakan layanan aplikasi daring. Pemda-pemda dan nagari-nagari pun seakan tidak berdaya menghadapi gejala sosial ini. Aparat keamanan sendiri juga belum bisa menindaknya secara maksimal, bahkan mereka seakan tidak memiliki “solusi” yang dapat menjawab keresahan umat.

Sebagai daerah yang masyarakatnya terkenal memiliki filosofi “adat bersendi syarak syarak bersendi Kitabullah” (ABSSBK), berita-berita minor tersebut menunjukkan tidak terkendalinya tindak maksiat di tanah Minang dan juga seakan tidak bisa diatasi dengan cara-cara biasa. Masalahnya bukan saja soal pemberantasannya, tetapi juga bagaimana pencegahannya. Bagaimana peran kelembagaan sosial dan budaya masyarakat Minang sendiri?. Apakah institusi adat, budaya dan agama yang dianut warga Minangkabau masih menjadi bagian solusi mengatasi masalah dan seperti apa pula formulanya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis. Peneliti menganalisis gejala dekadensi moral di Sumbar dan potensi dampaknya terhadap kehidupan anak-anak, remaja dan orangtua di Sumbar. Riset deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan apa-apa yang beberapa waktu belakangan berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif juga dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung ada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2009: 23).

Penelitian ini dengan melakukan observasi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan di berbagai tempat. Peneliti mengunjungi Perpustakaan UIN Imam Bonjol (Padang), Perpustakaan Daerah Sumbar (Padang) dan Perpustakaan Bung Hatta (Bukittinggi). Observasi dilakukan di kota Padang, Bukittinggi, Sungai Pua dan Rambatan. Kota Padang mewakili corak kota besar, Bukittinggi mewakili corak kota sedang, Sungai Pua dan Rambatan mewakili wilayah perdesaan atau pedalaman. Peneliti memilih objek riset dan wawancara terbatas kepada beberapa orang dan tentu saja penelusuran bahan tertulis baik cetak maupun onlen.

Data utamanya adalah data yang diperoleh dari bahan media massa dan media sosial, hasil wawancara *snowball* dengan para beberapa informan. Data pokok lain, media-media cetak dan onlen. Sumber data sekunder yakni berupa kajian-kajian terbaru terkait masalah tantangan pendidikan anak menghadapi gejala dekadensi moral di Sumbar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah studi pustaka dan arsip, observasi dan pendokumentasian sebagai bagian terpenting untuk mendapatkan data primer. Setelah itu melakukan verifikasi data. Data relevan akan dianalisis setelah disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian atau penulisan.

PEMBAHASAN

Ranah Adat Bersendikan Islam

Minangkabau dikenal sebagai daerah dengan masyarakat yang teguh memegang ajaran Islam dan adat serta budaya lokalnya. Agama Islam menjadi bagian “terdalam” dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat daerah (Hamka, 1984: 106-107). Di mana-mana di Sumatra Barat orang dengan mudah menemukan banyak masjid, surau, atau mushola dalam rentang jarak berdekatan. Belakangan ini syiar keislaman itu terasa makin semarak dengan munculnya banyak pesantren, sekolah-sekolah agama modern, sekolah-sekolah umum bercorak Islam, rumah-rumah tahfidz, serta kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tablig akbar, gerakan subuh berjamaaah, dan banyak lainnya.

Kuatnya hubungan masyarakat Minangkabau dengan agamanya sehingga kalau ada orang Minang murtad, maka ia akan dibuang sepanjang adat dan keminangannya otomatis akan tercerabut dengan sendirinya. Walaupun mazhab keislaman pada masyarakat Minang tidak satu, namun yang jelas orang Minang dikenal sebagai salah satu masyarakat yang dinilai teguh memegang dan mempertahankan Islam sebagai identitas sosial dan budayanya (Hamka, 1984)).

Namun kata pepatah Minang *sakali aie gadang sakali tapian berubah*. Jika dulu lingkungan sosial di ranah Minangkabau masih belum banyak terpapar budaya negatif dari luar, maka dewasa ini keadaannya sudah berubah. Masyarakat daerah makin terbuka akibat pengaruh kehidupan modern. Kasus prostitusi sendiri

contohnya memang adalah penyakit sosial sudah sudah klasik, namun dulu umumnya pelacuran masih dianggap tabu, bahkan membicarakannya saja orang Minang merasa malu. Namun dewasa ini di kota Padang misalnya, dalam batas tertentu, terkesan tak banyak berbeda dengan kota besar lainnya dalam urusan kuatnya pengaruh negatif “globalisasi” terhadap perilaku masyarakat.

Walaupun prostitusi adalah praktik yang dilarang oleh hukum negara dan agama, namun faktanya selalu muncul setiap waktu. Prostitusi memang lebih banyak muncul dan berkembang di daerah perkotaan dengan tipe masyarakat *gesselschaft* yang lebih terbuka dan anggota-anggotanya berhubungan atas dasar kepentingan, sehingga *social control*-nya pun menjadi longgar. Warga kota sering tidak terlalu peduli dengan tetangga dan lingkungan mereka, termasuk latar belakang dan jenis pekerjaannya (Jatmika, 2017:9). Ini berbeda dengan kota kecil atau perdesaan dengan tipe masyarakat *gemeinschaft* yang guyup, maka sistem kontrol sosialnya masih cukup kuat, sekalipun tidak selalu menjamin seratus persen. Lagipula, secara sosiologis, gejala prostitusi memang biasanya muncul dan berjalan seiring dengan perkembangan daerah dan masyarakat. Ketika terjadi percampuran penduduk (pluralisme sosial) akibat urbanisasi atau munculnya sentra-sentra ekonomi baru maka potensi munculnya aneka penyakit sosial akan makin besar pula.

Namun sekarang ini, dengan perkembangan teknologi, kemunculan masalah sosial itu pun semakin “canggih”. Akses internet yang begitu mudah dan luas menjangkau banyak sekali warga sampai ke pelosok-pelosok kampung. Tanpa filter dan literasi digital yang memadai, akses bebas ke dunia maya tentu bisa berdampak negatif kepada masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak. Sayangnya, hal ini belum terantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah, pemda dan tokoh

masyarakat. Bisa dibayangkan, betapapun banyaknya aturan anti-maksiat dibuat, tetapi jika anak-anak dan remaja diberikan kebebasan dalam mengakses dunia maya tanpa kontrol dari orang dewasa, maka hal itu bisa berdampak negatif terhadap perkembangan anak, baik mental, spritual maupun saraf otaknya. Konten-konten negatif yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, perjudian, dan perilaku menyimpang lainnya yang mudah diakses lewat perangkat *gadget* tentu akan mempengaruhi perilaku warga bahkan tidak hanya anak-anak dan remaja.

Sampai sekarang masih banyak meragukan bahwa prostitusi yang terjadi di Minangkabau melibatkan perempuan-perempuan lokal. Informasi yang didapatkan menunjukkan sebagian dari PSK itu adalah orang Minang sendiri, walaupun sebagian lainnya datang dari luar daerah. Kasus PSK atas nama NN, misalnya, adalah contoh PSK yang berasal dari luar Sumbar. Namun berdasarkan hasil-hasil investigasi media menunjukkan bahwa bisnis esek-esek ini tidak ada lagi mengenal batas-batas sosiologis dan antropologis tertentu. Masyarakat yang kelihatan lebih agamis sekalipun sebenarnya juga menyimpan beragam jenis penyakit sosial (*Haluan*, 3 Februrari 2020). Walaupun untuk prostitusi “kelas atas” yang marak diberitakan belakangan ini, terutama yang transaksinya menggunakan aplikasi media sosial, memang ada sinyalemen bahwa mereka umumnya dari luar Sumbar, namun hal itu tak mengurangi perhatian kita pada masalah pokoknya yakni degradasi moral di kalangan warga Sumbar. Perlu penelitian lebih lanjut berapa yang melibatkan anak kemenakan orang Minang sendiri. Apalagi yang namanya “konsumen” nya tentu sebagian adalah anak atau orang Minang sendiri. Sebab sebagai sebuah bisnis, berlaku hukum, bahwa tidak mungkin ada penawaran kalau tidak ada permintaan, dan sebaliknya.

Tugas Mendidik Anak

Untuk membentengi anak dan remaja dari pengaruh maksiat yang jaraknya makin mendekat ke lingkungan tempat tinggal keluarga-keluarga Minang, maka tugas dan kewajiban utama itu memang tetap harus dipikul oleh orang tua, namun tugas pemerintah, lembaga sosial, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan tetap sangat strategis, khususnya dalam menegakkan aturan terkait penanggulangan dampak sosialnya. Kenapa keluarga? Mendidik anak dan remaja secara esensial adalah tugas dan kewajiban orang tua dalam konteks pendidikan keluarga (Jailani, 2014: 246). Lingkungan keluarga adalah madrasah pertama dan utama bagi si anak. Ayah dan ibu adalah guru kehidupan bagi anak dalam arti yang sebenarnya. Orang tua harus menunjukkan sifat-sifat yang patut ditiru dan digugu si anak. Anak-anak itu bahkan ibarat gelas kosong yang siap diisi oleh orang tuanya, tergantung apakah akan diisi dengan air bersih atau air kotor. Oleh karena itu, ketika si buah hati lahir ke dunia, semestinya orang tua fokus mengasuh dan mendidik anak dalam arti seluas-luasnya. Peran ini tak hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga ayah semestinya, sekalipun fokus ayah memenuhi nafkah, khususnya dalam konteks ekonomi keluarga. Di Minangkabau sendiri, kini memang juga sudah banyak berubah. Dulu pembinaan anak dalam *scope* terendah adalah tanggungjawab *mamak* (paman dari pihak ibu), namun sekarang peran *mamak* dalam pembinaan kemenakan (keponakan) sudah banyak digantikan oleh ayah dan ibu dalam konstruksi keluarga batih, apalagi di wilayah perkotaan (Natin, 2008: 335).

Masalahnya pula sekarang, dalam tatanan kehidupan sosial sekarang di mana mulai banyak wanita bekerja, maka fokus mengasuh dan mendidik anak dalam lingkungan keluarga sering terabaikan, bahkan digantikan oleh asisten rumah tangga. Di kota-kota, bahkan sudah banyak keluarga menengah yang menyerahkan anaknya ke sekolah dengan pola *full day school*. Di kampung-kampung yang belum ramai memang masih ada anggota keluarga

besar yang dapat “mensubstitusi” peran ayah bunda yang bekerja, namun di daerah perkotaan hal itu hampir tidak mungkin lagi.

Setelah orang tua, baru sebenarnya tugas dan tanggung jawab pemerintah (sesuai UUD), agamawan, pendakwah, guru, dan juga masyarakat. Guru sendiri tugas dan tanggungjawabnya tentu sering hanya terbatas di lingkungan sekolah dan selama jam sekolah pula. Sekalipun demikian, kualitas guru dalam konteks akademis dan moral tetap yang utama. Dia akan menjadi sosok yang layak ditiru murid atau siswa. Tidak mudah menjadi guru sebenarnya. Di sekolah maupun masyarakat, guru adalah figur yang semestinya simbol moralitas.

Namun dengan kondisi di banyak daerah, di mana jumlah guru yang terbatas dan kuantitas murid yang banyak (*overload*), maka daya kontrol guru terhadap siswa pun belum tentu efektif. Guru-guru sendiri tentu juga adalah orang tua bagi anak-anaknya, yang bahkan banyak pula di antaranya disibukkan dengan aneka masalah domestik rumah tangganya, termasuk misalnya masalah “himpitan” ekonomi karena tuntutan kebutuhan hidup yang makin tinggi, sehingga tak jarang masalah sosial ekonomi domestik semacam itu memberi pengaruh pada kualitas proses pendidikan di sekolah.

Tugas dan tanggungjawab da'i dalam membentuk dan membangun generasi berakhlak Qurani sering hanya sebatas mengingatkan umat di mimbar-mimbar masjid, surau atau tempat umum lainnya. Itu pun tidak rutin dan tidak merata. Ada daerah yang rutin menggelar pengajian (ceramah) misalnya ba'da subuh atau ba'da magrib selama dua kali sepekan dengan menghadirkan ustadz-ustadz tertentu. Masalahnya, pengajian semacam itu pun lebih banyak diikuti generasi tua khususnya dari kalangan perempuan dibandingkan generasi muda dan dari kalangan laki-laki, sehingga terkesan internalisasi nilai-nilai keagamaan itu

condong hanya kepada golongan terbatas saja. Di sisi lain, pada umumnya masyarakat (laki-laki) mendapatkan siraman ruhaniah *bil lisan* dari para juru dakwah ini khutbah-khutbah jumat atau ceramah agama pada kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama Islam.

Memang Sumbar adalah contoh daerah di mana pada bulan puasa, ada ketentuan dari dinas pendidikan di banyak daerah yang mewajibkan sekolah-sekolah menggiatkan aitivitas bernuansa keagamaan sebagai bagian dari program kurikuler siswa selama Ramadhan. Namun kegiatan semacam itu ke depannya harus terus dievaluasi dalam arti mesti diperbaiki pola dan sistemnya sehingga tujuan pokoknya bisa tercapai, yakni terbinanya generasi Islam yang memahami dan mempraktikkan dengan baik ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak hanya di masa mudanya tetapi juga mesti membekas terus hingga masa tuanya.

Namun memang dalam praktiknya tak jarang kegiatan keagamaan di kalangan sebagian warga tidak berjalan dengan hikmat, sehingga minim penghayatan. Umpamanya kegiatan khutbah jumat. Persoalannya bukan hanya materi dan cara penyampaian yang mungkin kurang “greget” dirasakan oleh kebanyakan golongan anak-anak dan remaja, tetapi juga lingkungan masjid yang mungkin suasananya tidak kondusif pada saat pelaksanaan kegiatan jumat itu. Tak jarang ketika khatib menyampaikan khutbahnya di mimbar, banyak jamaah dari kalangan anak-anak yang biasanya duduk di bagian belakang tidak hanya tidak mendengarkan materinya dengan baik, apalagi untuk memahami substansi pesannya, tapi malahan juga suka membuat suasana “berisik” sehingga mengganggu kekhusukan ibadah jamaah lainnya. Karena itu, alangkah baiknya, jamaah masjid dari kalangan anak-anak dan remaja ini ditempatkan pada posisi tidak mengelompok dengan sesama mereka,

melainkan memencar atau bercampur dengan jemaah dari kalangan orang dewasa.

Memang dewasa ini mulai marak dakwah melalui media sosial, seperti lewat kanal *youtube*, namun pengaruhnya terhadap penguatan kadar ghirah keagamaan warga masyarakat belum bisa diukur secara kasat mata. Dakwah seperti yang disampaikan Ustadz Abdul Somad memang menjangkau banyak orang, segala lapisan dan dalam cakupan wilayah yang luas, tapi apakah efektif dalam membina akhlak anak-anak dan remaja Muslim yang sedang mengalami masa-masa pancaroba, belum bisa dilihat secara nyata. Sebabnya di sisi lain, dakwah agama akan selalu berkejaran dengan penetrasi pengaruh negatif lewat berbagai platform media informasi dan komunikasi, terutama karena maraknya penggunaan gadget di kalangan remaja dan anak-anak.

Sementara itu, tugas utama pemerintah antara lain adalah mengatur dan menegakkan hukum. Kegiatan maksiat apapun jelas terlarang. Pemda sendiri misalnya sejak awal memang telah membuat sejumlah regulasi pembinaan moral warga. Di Sumbar di awal reformasi bahkan ada perda antimaksiat, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat. Perda itu sempat sedikit dikoreksi, namun juga tak bisa berjalan dengan baik. Bahkan bisa dikatakan beberapa pasal berdempetan dengan aturan yang sudah diatur dalam UU KUHP. Masalah utama adalah komitmen dan ketegasan penegak hukum itu sendiri.

Kenapa dikatakan sebagian, karena maksiat ini adalah gejala kompleks. Masalah maksiat, seperti prostitusi, bukan hanya masalah bagaimana memberantas tindak maksiatnya, tetapi harus menyentuh pada bagian “hulu” masalahnya. Artinya, masyarakat dan pemerintah pertama-tama mesti bertanya (tidak hanya reaktif), apa sebenarnya akar masalah sehingga maksiat masih kerap muncul dan mewabah di masyarakat? Mengapa prostitusi bisa tumbuh di masyarakat kita yang mayoritas

penduduknya beragama Islam bahkan terkenal taat pula menjalankan ajaran agama? Kenapa gejala maksiat bisa berbarengan munculnya dengan maraknya syiar agama itu sendiri?

Tentu kita tak bisa meneropong masalahnya secara sepotong-sepotong, misalnya dengan mengatakan bahwa itu semua karena metode dakwah yang belum menyentuh lubuk hati ummat; atau penegakan hukum yang belum tegas; atau lemahnya sistem pendidikan karakter di sekolah; atau kurangnya perhatian, pola asuh dan pendidikan orang tua; atau juga rendahnya kepedulian tokoh-tokoh informal di masyarakat. Kita juga tak bisa mengatakan bahwa semua gejala itu adalah akibat pengaruh penetrasi media informasi yang dituding menularkan virus budaya negatif dari luar daerah atau negara, seperti pola pergaulan bebas, narkoba, kekerasan, pola hidup hedonis, dan lain sebagainya. Dalam konteks melihat suatu gejala sosial, semua variabel tersebut bisa saling mempengaruhi dan menjadi faktor-faktor yang memungkinkan maraknya aneka patologi sosial. Namun jangan sampai pula kita lupa untuk melihat akar masalah utama dari munculnya fenomema penyakit sosial, seperti prostitusi itu.

Salah satu penyebab munculnya penyakit sosial seperti prostitusi adalah masalah kemiskinan. Kasus NN menunjukkan bahwa kemiskinan menjerumuskannya kepada dunia hitam. Karena desakan hidup seorang perempuan mau meninggalkan daerahnya atau kampung halamannya untuk melakukan pekerjaan terlarang dan hina di mata agama, hukum dan masyarakat. Apalagi kalau fondasi iman dalam dirinya juga rapuh. Pada mulanya mungkin ia bekerja di sektor yang dianggap normal, namun karena pengaruh media termasuk medsos, maka mereka pun ikut tergoda untuk mendapatkan materi dalam jumlah lebih besar dengan cara mudah, sekalipun tidak bermoral, untuk memenuhi desakan kebutuhan hidup yang makin meningkat.

Budaya Minang

Pendekatan budaya Minang di sini tak hanya memberikan penyuluhan adat, budaya dan agama secara periodik tertentu kepada warga masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di nagari-nagari, tetapi juga usaha menyeluruh komunitas adat dan budaya melakukan penanggulangan akar masalah maraknya kemaksiatan di daerah. Kalau penyuluhan adat tidak hanya dilakukan di nagari-nagari tetapi juga di wilayah kota, seperti kota Padang, walaupun sistem adat dan budayanya sudah agak berbeda, karena sudah terjadi percampuran dengan budaya masyarakat pendatang.

Sementara penanggulangan akar masalah maksiat harus dirunut dari “hulu” nya. Kalau ada di antara anak kenenakan orang Minang yang terjerembab ke lembah “hitam”, maka kemungkinan masalahnya tidak hanya karena pengaruh pergaulan yang tidak benar atau keluar dari pakem adat dan agama, tetapi juga umumnya karena belitan kemiskinan. Adanya ekses dari sistem pergaulan tidak benar bisa diatasi antara lain dengan pembinaan menyeluruh terhadap anak kenenakan tidak hanya pada saat dia masih usia anak-anak, tetapi juga ketika dia memasuki usia remaja atau pubertas dan selanjutnya masa dewasa awal.

Sejauh ini di banyak nagari dikenal istilah *paga nagari* (ketahanan nagari). Di Sungai Pua dinamakan *Parik Paga Nagari*. Ketahanan nagari sering dikaitkan pada ketahanan sosial dan budaya, termasuk agama. Kalau ketahanan sosial, budaya dan agama masyarakat kuat, maka segala tantangan zaman bisa diatasi dengan baik (lihat website *nagari-sungaipua.com*). Masalahnya ketahanan sosial, budaya dan agama pada masyarakat kerap naik turun. Adakalanya longgar. Di bidang sosial budaya, ada saatnya pengaruh budaya eksternal dengan mudah masuk dan mempengaruhi perilaku hidup warga terutama kaum muda. Walaupun pengaruh negatif budaya eksternal bukan hal baru,

tetapi tantangan dewasa ini lebih dahsyat akibat penetrasi teknologi digital yang merambah dan bisa diakses siapa saja. Paga nagari harus bisa memastikan bahwa akses informasi itu difilter sendiri oleh elemen-elemen dalam sistem *paga nagari*. Sebagai contoh aturan nagari bahwa anak-anak di bawah 18 tahun belum diperkenankan memiliki telepon *android*; bagi penggunaan android dan televisi tidak boleh pada jam 18.00 sampai 21.00 karena pada waktu itu merupakan waktu belajar dan mengaji bagi anak-anak.

Paga nagari sejatinya adalah fungsi para mamak, pimpinan suku (penghulu) dan tokoh agama lokal yang memiliki kepedulian dalam menjaga komunitasnya, terutama anak dan kemenakannya. Mereka berperan sebagai *bemper* mencegah tindak dan perilaku maksiat dan penyakit sosial lainnya. Mereka dapat memastikan warganya mendapatkan pemahaman yang baik mengenai adat, budaya dan agama. Peranan dimaksud tentu bukan *lip service*, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kenyataan di nagari-nagari. Harus ada kesadaran kolektif tokoh masyarakat nagari dan kaum tentang ancaman pelapukan adat, budaya dan agama mereka sehingga perlu diantisipasi dengan sebijak mungkin, terutama mengurus langsung anak kenenakan masing-masing. Di kampung, komunikasi yang intens antara pihak mamak dengan kenenakan harus sama intensifnya dengan anak dan istri mereka sendiri. Begitu pula perhatian dan keterlibatan para *ustadz* dan *buya* harus lebih dalam lagi kepada jemaah yang tidak lain adalah warganya sendiri (Natin, 2008).

Pada tingkat formal, di nagari-nagari sudah ada yang namanya Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang sejauh ini perannya merupakan perwakilan anak nagari. Ke depannya, KAN tidak hanya dianggap sebagai legislatifnya nagari saja, tetapi juga bagian dari pranata sosial yang memberikan peranan dan solusi bagi berbagai permasalahan aktual anak nagari, baik politik, sosial, budaya maupun

ekonomi. Bersama wali nagari dan tokoh masyarakat serta perantau, KAN bisa menjadi “jembatan” bagi upaya mencari jalan keluar dari aneka permasalahan masyarakat yang diwakilinya.

Namun memang tantangannya dewasa ini tidak mudah. Mamak misalnya, kini banyak yang “jauh” dari kemenakannya. Bahkan mamak banyak yang tinggal di kota atau rantau, sehingga kondisi kemenakan di kampung tidak terkontrol dengan baik. Termasuk kondisi ekonomi rumah tangga kemenakan sendiri. Tapi bagaimanapun, harus ada peran pengganti mamak di kampung. Tidak ada yang tidak bermamak bagi mereka yang tinggal di nagari, termasuk warga pendatang sekalipun. Budaya *malakok* merupakan suatu budaya *adaptasi* yang dapat menjadi mekanisme kontrol sosial antara lain untuk mencegah terjadinya disorientasi budaya akibat interaksi penduduk asli dengan pendatang yang tentu memiliki budaya bawaannya sendiri. Di sinilah peran komunitas adat lebih besar, yakni kaum atau kampung, menjadi sangat penting, untuk menciptakan harmoni sosial

Dengan demikian mamak dan tokoh masyarakat yang ada di kampung termasuk kalangan orang tua sendiri adalah “polisi” yang intens terhadap kondisi anak kemenakan yang ada di lingkungan terdekat mereka sendiri. Pengawasan terhadap anak khususnya yang menginjak usia remaja, bahkan mesti diintensifkan apalagi dalam menghadapi tantangan era digital yang pemanfaatannya jika tidak difilter dengan baik justru bisa merusak moralitas anak dan generasi muda. Untungnya di banyak kampung, seperti nagari Sungai Pua dan Rambatan, kegiatan keagamaan dan silaturahmi warga tetap terjaga dan mesti dilestarikan terus. Kegiatan dalam konteks kematian, pernikahan, batagak panghulu, majelis taklim, syukuran warga, pemuda dan remaja masjid, dan lainnya menjadi wahana kontrol sosial sesama warga kampung.

Di nagari seperti Sungai Pua juga sudah ada peraturan nagari yang terkait dengan pencegahan secara tidak langsung gejala maksiat, walaupun skopnya hanya pada masyarakat nagari setempat. Aturan itu umumnya menyangkut pakaian muslim, pembinaan adat dan agama, wajib baca tulis Quran, wajib wajib nonaktif televisi, dan tampilan aneka simbol-simbol agama dan budaya lainnya. Ke depan, bagaimana jika perna-perna itu, terutama di nagari-nagari lainnya, bisa pula mencakup penanggulangan akar masalah krisis moral, misalnya penanggulangan kemiskinan lewat langkah komprehensif, seperti dana bantuan nagari untuk warga miskin. Sedapatnya dana nagari dimaksud tidak seperti memberi ikan, tetapi adalah memberikan kailnya. Dalam konteks itulah, (parik) *paga nagari* tidak hanya terkait mekanisme perlindungan warga dari ancaman dan tantangan sosial budaya, tetapi juga ekonomi dan lainnya.

PENUTUP

Bagaimanapun solusi atas masalah ini tak bisa sepotong-sepotong, parsial atau tambal sulam. Memang ada diungkap kasus prostitusi, terus menjadi viral, karena adanya pengerebekan dilakukan anggota dewan yang populer, namun ke depannya masih harus dipertanyakan kelanjutan antisipasi dan penanggulangan gejala maksiat dan dekadensi moral ini di daerah yang dikenal sebagai bassu budaya Minang yang luhur.

Harus dipikirkan dan ditindaklanjuti upaya mencari solusi komprehensif atas masalah kerusakan moral kolektif di Sumbar. Tentu berbagai pihak, utamanya pemda dan masyarakat tidak bisa bersifat eskapistik dan bahkan fatalistik dengan mengatakan, bahwa masalah dekadensi moral dan akhlak ini sudah setua sejarah umat manusia dan dewasa ini bahkan pengaruh modernisasi dan globalisasi juga sangat dahsyat.

Sudah tentu perlu ditanggulangi dengan pendekatan komprehensif. Tidak

hanya dari aspek pemberantasan yang bersifat penindakan yang merupakan hilir dari semua masalah ini, tetapi juga dicarikan solusi atas akar-akar masalah sebagai hulu dari gejala penyakit masyarakat ini. Termasuk di nagari-nagari. Mulai masalah kemiskinan, migrasi penduduk, pendidikan akhlak, dan pemantapan kehidupan ruhaniah anggota masyarakat khususnya masyarakat adat dan budaya Minangkabau sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Afridinata, Heri dkk. “Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan bernuansa surau. Link: <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/687/565>. Diakses 10 Februari 2020.

Abidin, Masoed. 2008. “Gerakan Pendidikan bernuansa Surau” dalam <https://dewandakwah.wordpress.com/2008/09/18/23/>. Diakses 10 Februari 2020.

Jailani, Syahrani, 2014. “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”. *Jurnal Nadwa* , Vol 8 No.2

Jatmika, Devi. 2017. “Hubungan Budaya Individualis-Kolektif dan Motivasi Belanja Hedonik pada Masyarakat Kota Jakarta”. *Jurnal Psikologi Psibernetika*. Vol 10 No. 1

Rahmi, “Pendidikan anak dalam keluarga dalam perspektif Islam” dalam <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attarbiyah/article/view/1126>. Diakses 10 Februari 2020.

Eliza, Delfi, “Pengembangan model pembelajaran karakter berbasis cerita tradisional minangkabau untuk anak usia dini” dalam <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1072>. Diakses 10 Februari 2020.

Natin, Sri. 2008. “Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak terhadap Anak da Kemenakan di ranah Minang DOI:

<https://doi.org/10.22146/jmh.16306>.

Diakses 10 Februari 2020.

Sumber media online

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/68279/lgbt-sumbar-terbanyak-indonesia>. Diakses 9 Februari 2020.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/23/p7n3wf415-ini-fakta-angka-soal-lgbt-di-sumatra-barat>. Diakses 10 Februari 2020.

<https://nagari-sungaipua.com/hal-sejarah-.html>. Diakses 10 Februari 2020

<https://www.tagar.id/tarif-prostitusi-online-libatkan-pelajar-di-padang>. Diakses 11 Februari 2020.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/318947/ibu-dan-anak-di-lubuk-buaya-terjerat-kasus-prostitusi-berikut-peran-mereka>. Diakses 11 Februari 2020.

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/85823/dua-remaja-jadi-mucikari-prostitusi-online-di-padang-korbannya-pelajar>. Diakses 12 Februari 2020.